

Membangun Kesadaran Inklusif-Multikultural untuk Deradikalisasi Pendidikan Islam

Andik Wahyun Muqoyyidin

Fakultas Agama Islam

Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘Ulum Jombang

e-mail: *andikwahyun_m@yahoo.com*

DOI: 10.14421/jpi.2013.21.131-151

Diterima: 7 Maret 2013

Direvisi: 20 April 2013

Disetujui: 13 Juni 2013

Abstract

There are still many acts of terrorism that are as concrete evidences of how the use of the security approach alone isn't effective enough to eradicate terrorism and Islamic radicalism to its roots in Indonesian. Therefore, various approaches of handling terrorism and Islamic radicalism must also be constantly pursued. That is the de-radicalization program through the nuances of Islamic education multicultural inclusiveness. In this case, they should pay attention to curriculum factors, educators, and educators use learning strategies.

Keywords: *De-radicalization, Islamic Education, Multicultural-Inclusiveness.*

Abstrak

Masih banyaknya aksi terorisme di bumi Indonesia merupakan bukti konkrit betapa penggunaan pendekatan keamanan saja tidak cukup efektif untuk membasmi terorisme dan radikalisme Islam hingga akar-akarnya. Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanganan terorisme dan radikalisme Islam lainnya harus pula senantiasa diupayakan. Salah satunya adalah dengan program deradikalisasi melalui pendidikan Islam bernuansa inklusif-multikultural. Dalam hal ini, mereka perlu memperhatikan faktor kurikulum, pendidik, dan strategi pembelajaran yang digunakan pendidik.

Kata Kunci: Deradikalisasi, Pendidikan Islam, Inklusif-multikultural

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas.¹ Indonesia terdiri dari 17.504 pulau. Sekitar 11 ribu pulau dihuni oleh penduduk dengan 359 suku dan 726 bahasa. Mengacu pada PNPS no. 1 tahun 1969—yang baru saja dipertahankan Mahkamah Konstitusi—Indonesia memiliki lima agama. Di bawah pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid, Konghucu menjadi agama keenam. Meski hanya enam, di dalam masing-masing agama tersebut terdiri dari berbagai aliran dalam bentuk organisasi sosial. Begitu juga ratusan aliran kepercayaan hidup dan berkembang di Indonesia.²

Apabila dapat dikelola secara baik, kemajemukan sejatinya merupakan modal sosial yang amat berharga bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya, jika tidak dapat dikelola secara baik, maka kemajemukan berpotensi menimbulkan konflik dan gesekan-gesekan sosial. Sepertinya Indonesia merupakan negara yang belum mampu mengelola kemajemukan dengan baik. Terutama pasca tumbangannya rezim Orde Baru, aksi terorisme dan radikalisme Islam merebak di Indonesia. Dalam kurun waktu tidak lebih dari satu dekade, bom silih berganti mengguncang republik pluralis ini. Sebut saja misalnya bom Bali I, bom Bali II, bom Kedutaan Besar Australia, bom Hotel JW Marriot I, bom Hotel JW Marriot II, bom Hotel Ritz Carlton, “bom buku” yang ditujukan ke sejumlah tokoh, “bom Jum’at” di masjid Mapolres Cirebon, dan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton, Solo.³

Selain sederet kasus terorisme seperti disebutkan di atas, radikalisme Islam juga merebak di mana-mana. Contoh kasus radikalisme Islam yang terjadi di Indonesia adalah penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten serta penyerangan pondok pesantren yang diduga beraliran Syiah di Pasuruan dan Sampang, Jawa Timur. Banyaknya konflik yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini belum memahami arti keragaman dan perbedaan. Tidak sedikit di antara manusia yang hendak meniadakan kebhinekaan (*plurality*) dan menggantinya dengan ketunggalan dan keseragaman (*uniformity*).

¹ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 4

² Husni Mubarak, “Memahami Kembali Arti Keragaman: Dimensi Eksistensial, Sosial dan Institusional”, *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius*, IX (35) Juli-September 2010: 33

³ Indriyani Ma’rifah, “Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam,” *Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012*: 227

Ironisnya, para teroris dan kaum radikal mengklaim bahwa semua itu dilakukan karena perintah agama (Islam).⁴

Maraknya aksi radikalisme dan terorisme atas nama Islam di dunia maupun Indonesia sedikit banyak telah menempatkan umat Islam sebagai pihak yang dipersalahkan. Ajaran jihad dalam Islam seringkali dijadikan sasaran tuduhan sebagai sumber utama terjadinya kekerasan atas nama agama oleh umat Islam. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia semisal madrasah ataupun pondok pesantren, juga tidak lepas dari tuduhan yang memojokkan tersebut. Lembaga pendidikan Islam tertua dalam sejarah Indonesia ini seringkali diasosiasikan sebagai ‘markas atau sentral pemahaman Islam yang sangat fundamental’ yang kemudian menjadi akar bagi gerakan radikal mengatasnamakan Islam.⁵

Pendidikan dan lembaga pendidikan sangat berpeluang menjadi penyebar benih radikalisme dan sekaligus penangkal (baca: deradikalisasi) Islam radikal. Studi-studi tentang radikalisme dan terorisme mensinyalir adanya lembaga pendidikan Islam tertentu (terutama yang nonformal, seperti pesantren) telah mengajarkan fundamentalisme dan radikalisme kepada para peserta didik sehingga tokoh sekaliber Jusuf Kalla misalnya, sempat melontarkan ide pengambilan sidik jari dari semua santri.⁶

Sejalan dengan menjamurnya ormas-ormas Islam pasca reformasi, pendidikan (*tarbiyah*) dianggap pintu efektif bagi penyebaran dakwah Islam. Kini, lahir ribuan pendidikan Islam terpadu (jenjang PAUD, TK hingga SLTA) yang didirikan oleh ormas-ormas Islam tertentu dari berbagai jenjang pendidikan. Ormas-ormas Islam itu memiliki ciri keagamaan yang mereka anut adalah: (1) Khas Islam Timur Tengah; (2) Leterlek dan harfiah dalam memahami Islam; (3) Mengenalkan istilah-istilah baru yang bernuansa Arab seperti *halaqah*, *dawrah*, *mabit* dan seterusnya.⁷

Siswa/siswi sekolah menengah atas (SMA/SMK) digarap serius oleh ormas-ormas Islam yang bercirikan seperti di atas. Moment *dawrah*, *halaqah* dan *mabit* di satu sisi sangat positif dan membantu kerja guru agama untuk menanam akidah dan syariat Islam. Namun di sisi lain, model Islam yang diajarkan cenderung mendorong peserta didik untuk tidak toleran terhadap pihak lain.⁸ Azyumardi Azra

⁴ *Ibid.*

⁵ Republika Newsroom. “Perlu Deradikalisasi Pemahaman Islam di Ponpes.” Jumat, 6 Februari 2009. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/02/06/29871-perlu-deradikalisasi-pemahaman-islam-di-ponpes> [26 April 2013]

⁶ Niken Widya Yunita. “Sidik Jari Santri, Kalla Soroti Sikap Sensitif Tanpa Alasan.” *detikNews*. Rabu, 7 Desember 2005. <http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/12/tgl/07/time/132014/idnews/493843/idkanal/10> [26 April 2013]

⁷ Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal”, *Walisongo*, 20 (1) Mei 2012: 81

⁸ *Ibid.*

mengatakan bahwa anak-anak sekolah menjadi target khusus rekrutmen kelompok teroris dan radikal. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah ini mengemukakan bahwa beberapa penelitian membuktikan adanya upaya rekrutmen ke sekolah-sekolah, dengan melakukan “cuci otak” terhadap pelajar, yang selanjutnya diisi dengan ideologi radikal tertentu.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) Jakarta sungguh mengejutkan. Penelitian yang dilakukan antara Oktober 2010 hingga 2011 terhadap guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan siswa (SMP dan SMA) di Jabodetabek menunjukkan bahwa 49% siswa setuju dengan aksi radikalisme demi agama.¹⁰ Di beberapa kampus perguruan tinggi umum, kecenderungan mahasiswa untuk mendukung tindakan radikalisme juga sangat tinggi. Hal ini terungkap dalam penelitian tentang Islam Kampus yang melibatkan 2466 sampel mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Ketika para mahasiswa ditanya tentang pelaksanaan *amar makruf nahi munkar* dalam bentuk *sweeping* tempat-tempat yang dianggap sumber maksiat, mereka menjawab sebagai berikut: sekitar 65% (1594 responden) mendukung dilaksanakannya *sweeping* kemaksiatan, 18% (446 responden) mendukung sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan *sweeping*. Sekitar 11% (268 responden) menyatakan tidak mendukung *sweeping*, dan sisanya, 6% (158 responden) tidak memberikan jawabannya. Selanjutnya, mereka yang mendukung *sweeping* beralasan bahwa kegiatan *sweeping* tersebut sebagai bagian dari perintah agama (88%), mendukung *sweeping* karena berpendapat bahwa aparat keamanan tidak mampu menegakkan hukum (4%), dan karena alasan dekadensi moral (8%).¹¹

Meskipun faktor kemunculan terorisme dan juga radikalisme Islam sangatlah kompleks, namun merebaknya fenomena tersebut dapat menjadi cermin PAI di negeri ini. Harus diakui bahwa praktik pendidikan agama (Islam) selama ini lebih bercorak eksklusivistik ketimbang inklusivistik. Artinya, pengajaran pendidikan agama (Islam) lebih menonjolkan pada klaim kebenaran agama sendiri dan menganggap agamanya sebagai satu-satunya jalan keselamatan (*salvation and truth claim*) serta menganggap agama orang lain keliru dan menganggapnya tidak akan selamat.¹²

⁹ Azyumardi Azra. “Rekrutmen Anak Sekolah.” *UIN Jakarta*. Kamis, 28 April 2011. <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1912--rekrutmen-anak-sekolah.html> [26 April 2013]

¹⁰ Abu Rokhmad, “Radikalisme Islam...”, hlm. 81

¹¹ Abdullah Fadjar dkk., *Laporan Penelitian Islam Kampus*, (Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2007), hlm. 35

¹² Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 31

Oleh karena itu, dalam pandangan penulis, deradikalisasi pendidikan Islam merupakan suatu keniscayaan. Upaya deradikalisasi pendidikan Islam dalam rangka membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk meminimalisir radikalisme Islam perlu menjadi kajian yang mendalam bagi para ahli dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia. Penulis sependapat sekali dengan ungkapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nur Syam, bahwa jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan membangun deradikalisasi agama melalui lembaga pendidikan. Dan untuk itu sangat diperlukan gerakan *review* kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan anti radikalisasi agama ini.¹³

Memahami Karakteristik Radikalisme Islam

Perkataan *radikal* berasal dari bahasa latin “*radix*” yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat bermakna *ekstrim*, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktik penganut paham radikal atau paham ekstrim.¹⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme diartikan sebagai “paham atau aliran yang menginginkan perubahan dengan cara keras atau drastis.”¹⁵ Sementara Sartono Kartodirdjo mengartikan radikalisme sebagai “gerakan sosial yang menolak secara menyeluruh tertib sosial yang sedang berlangsung dan ditandai oleh kejengkelan moral yang kuat untuk menentang dan bermusuhan dengan kaum yang memiliki hak-hak istimewa dan yang berkuasa.”¹⁶ Dengan demikian, radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragama, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi.¹⁷

Radikalisme keagamaan (Islam) dalam tulisan ini penulis definisikan sebagai pengimplementasian faham dan nilai ajaran agama (Islam) dengan cara radikal (keras), fanatik, ekstrim atau mendasar. Namun perlu dicatat juga bahwa radikalisme faham keberagamaan tidak selalu ditandai dengan aksi-aksi kekerasan yang bersifat anarkis. Dalam realita memang dapat ditemui bahwa sebagian kelompok gerakan radikal keagamaan hanya terbatas pada pemikiran dan ideologi, dan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melaksanakan faham ajarannya,

¹³ Nur Syam. “Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan.” *IAIN Sunan Ampel*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2566> [26 April 2013]

¹⁴ Nuhrison M. Nuh, “Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia”, *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius*, VIII (31) Juli-September 2009: 36

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 719

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Ratu Adil* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 38

¹⁷ Mohammad Kosim, “Pesantren dan Wacana Radikalisme”, *KARSA*, IX (1) April 2006: 844

tetapi sebagian kelompok radikal yang lain menghalalkan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan faham keagamaannya. Karena itu, gerakan radikalisme keagamaan tidak selalu ditandai dengan anarkisme atau terorisme.

Lebih detail, Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme Islam. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan. *Kedua*, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya—di Timur Tengah—secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Al-Qur'an dan hadits hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. *Ketiga*, karena perhatian lebih terfokus pada teks Al-Qur'an dan hadits, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*. *Keempat*, menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisasi. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadits. *Kelima*, gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.¹⁸

Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara gerakan radikalisme memang tampak cukup merepotkan para penguasa, terutama karena beberapa alasan: *Pertama*, gerakan radikalisme sering dinilai sebagai gerakan yang berkepentingan untuk membangun dan mewarnai dasar ideologi negara dengan faham ideologinya secara murni, atau mengganti ideologi negara yang sudah mapan dengan ideologi kelompok gerakan radikal tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain yang berbeda dengannya.

Kedua, gerakan radikalisme dianggap membawa instabilitas sosial, keresahan sosial, terutama karena sifat gerakan tersebut yang militan, keras, tegas, hitam putih, tidak menyerah dan tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang cenderung anarkis dan merusak. Di samping itu gerakan radikalisme tersebut juga dipandang tidak mau kompromi serta tidak toleran terhadap kepentingan kelompok lain.

Ketiga, dampak dari gerakan radikalisme baik secara langsung maupun tidak langsung dipandang dapat mengancam eksistensi kedudukan para elit penguasa, terutama karena pengaruh agitasi ideologi dan provokasi gerakan radikal yang meluas dalam masyarakat dapat menurunkan tingkat kepercayaan rakyat terhadap rezim penguasa tersebut, yang pada gilirannya dapat melahirkan pembangkangan

¹⁸ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), hlm. 63

dan revolusi sosial yang akan meruntuhkan singgasana rezim penguasa. Karena itu tidaklah mengherankan apabila siapa pun rezim penguasa di sebuah negara akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeliminasi, menjinakkan, meredam atau menangkal berkembangnya gerakan radikalisme.¹⁹

Terkadang, radikalisme juga diidentikkan dengan problem terorisme. Sehingga, tuduhan pelaku teror kepada warga Negara sering ditujukan kepada mereka yang dianggap radikal. Padahal, secara konseptual hal tersebut masih berada dalam perdebatan. Dalam sebuah wawancara dengan majalah *Tempo* (21/3/2011), Ansyad Mbai menyatakan bahwa radikalisme adalah akar dari terorisme.²⁰ Menurut Kepala Badan Penanggulangan Teroris (BNPT) ini, ideologi radikal adalah penyebab dari maraknya aksi teror di Indonesia, sehingga pencegahan terorisme harus diikuti oleh pemberantasan radikalisme. Secara spesifik, Mbai melihat adanya ideologi tersebut dalam perilaku teror di masyarakat sejak tahun 2000-an.

Sebetulnya ada beberapa cara pandang sebagai alat untuk melacak akar radikalisme Islam di Indonesia. Cara pandang paling khas ditunjukkan oleh Samuel Huntington (1997) dengan tesis *Clash of Civilization* yang melihat terorisme sebagai implikasi dari benturan dua peradaban utama di dunia: Islam *vis-a-vis* Barat. Logika Huntington bertitik tolak dari gaya pandang realisme yang memandang politik dunia sebagai *struggle for power* – perebutan kekuasaan. Bedanya dari pemikir realis klasik seperti Morgenthau yang menempatkan negara dalam posisi sentral, atau Waltz yang lebih menempatkan kekuasaan (*power*) dalam perspektif yang material, Huntington berangkat dari pembagian dunia atas apa yang ia sebut sebagai “peradaban.”²¹

Huntington menganggap dunia sebagai sebuah perpaduan antarperadaban yang bersifat multipolar, oleh karena itu ia membagi dunia menjadi delapan peradaban besar. Prinsip realisme yang memosisikan *interest* dalam konteks *power* memberi basis logika kedua: persaingan antarperadaban menghasilkan konflik dan pertentangan. Jika logika tersebut digunakan sebagai pisau untuk menafsirkan radikalisme di Indonesia, kita akan sampai pada sebuah titik kesimpulan: terorisme adalah eksekusi dari tidak kompatibelnya peradaban Islam dan Barat. Hal ini dipertegas

¹⁹ Nuhrison M. Nuh, “Faktor-Faktor Penyebab”..., hlm. 39

²⁰ Pada wawancara itu, ia menyatakan bahwa ada ideologi yang terstruktur di balik pelaku teror. Selama radikalisme tidak dibendung, terorisme tetap akan marak. Ia menyatakan hal ini ketika mengomentari teror bom buku sebagaimana sudah disinggung penulis pada uraian sebelumnya. Lihat wawancara Majalah Tempo, 21/3/2011 via Dimas. “Ansyad Mbai: Dari Penjara, Mereka Bisa Kendalikan Aksi Teror.” *Tempo.co*. Senin, 21 Maret 2011. <http://www.tempo.co/read/new/s/2011/03/21/078321584/Ansyad-Mbai-Dari-Penjara-Mereka-Bisa-Kendalikan-Aksi-Teror> [28 April 2013]

²¹ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “Melacak Akar Radikalisme di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (2) November 2010: 171

oleh atribut yang dikenakan oleh pelaku teror, dengan memberi warna Islam sebagai argumen.²²

Beberapa penulis yang dianggap “moderat”, seperti Mujani (2007) atau van Bruinessen (2002) mencoba melacak akar genealogis dari Islam Radikal dalam berbagai sudut pandang yang linier dengan teori Huntington di atas.²³ Mujani yang menganalisis keterkaitan Islam dan demokrasi di Indonesia menilai, keberadaan Islam Radikal bukan fenomena yang *genuine* lahir di Indonesia. Mereka kental dengan pengaruh-pengaruh eksternal dari Timur Tengah. Keberadaan gagasan “Islamisme” yang mereka bawa pun tidak sepenuhnya mencerminkan ke-Indonesiaan.

Sehingga, ada dua hal yang bisa kita baca sebagai penyebab radikalisme. *Pertama*, warisan sejarah umat Islam yang konfliktual dengan rezim, karena ada modus-modus penindasan politik Islam yang terjadi pada beberapa fragmen sejarah, khususnya Orde Baru. Kelompok yang termarjinalkan secara historis tersebut, dengan kesadaran sejarah, mencoba mengembalikan posisi politik Islam dengan jalan-jalan non-negara dan struktural. Dalam konteks global, adanya marjinalisasi politik Islam oleh hegemoni dalam politik internasional (Amerika Serikat) menyebabkan adanya kesadaran untuk mengembalikan daulat politik Islam. Transnasionalisme membawa kesadaran tersebut ke Indonesia dalam bentuk gerakan-gerakan politik Islam.

Kedua, fenomena ekonomi-politik. Selain adanya penindasan politik, argumen kedua adalah adanya penindasan ekonomi-politik. Dengan argumen ini, radikalisme muncul karena akses kapitalisme yang menciptakan mereka tak memiliki akses pada sumber-sumber modal. Dalam bahasa ekonomi-politik, pendekatan ini dikenal dengan “pendekatan kelas”. Artinya, respons radikalisme pada dasarnya adalah respons kelas untuk melawan hegemoni kapital yang oligarkis dengan negara. Dengan demikian, radikalisme dibaca sebagai potret kesadaran sejarah yang berpadu dengan kesadaran kelas.²⁴

Perspektif yang baru dan berbeda dikemukakan oleh A. Safril Mubah. Menurut peneliti masalah terorisme dan globalisasi pada Cakra Studi Global Strategis (CSGS) Surabaya ini, di Indonesia, akar aksi teror seringkali diarahkan pada radikalisme agama. Publik seolah menutup mata bahwa radikalisme itu juga disebabkan oleh proses globalisasi yang dialami pelaku teror. Hampir semua kajian

²² *Ibid.*

²³ Lihat Saiful Mujani, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia, 2007) serta Martin van Bruinessen, “Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia”, *South East Asia Research*, 10 (2) 2002: 117-154

²⁴ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “Melacak Akar Radikalisme”, hlm. 172

di Indonesia mengaitkan terorisme dengan radikalisme. Sangat jarang ditemukan kajian yang menghubungkan terorisme dengan globalisasi.²⁵

Berawal dari rentetan peledakan bom sepanjang 2002-2009, Safril menemukan bukti bahwa target serangan-serangan terorisme itu merupakan kepentingan strategis Amerika yang dipandang sebagai ikon globalisasi. Artinya, apabila terorisme dan globalisasi disintesiskan, maka muncul sebuah relasi simbiotik di antara dua konsep besar itu. Di satu sisi globalisasi telah mendorong peningkatan aktivitas terorisme. Di sisi lain, teroris memanfaatkan instrumen globalisasi seperti internet untuk menyebarkan ancaman ketakutan secara meluas.²⁶

Mencari dan melacak akar penyebab radikalisme dengan faktor di luar agama sebagai pemicunya sebagaimana uraian di atas memang sangat mungkin, tapi berusaha mengelak untuk tidak mengaitkan radikalisme dengan agama—sebagaimana dipahami pemeluknya—bukan hal yang mudah, karena dalam realitas fenomena tersebut mudah dijumpai. Yang jelas, sebagaimana pendapat Mun'im A. Sirry, radikalisme agama tidak pernah terjadi di ruang hampa atau dalam situasi vakum, selalu ada sebab dan sasaran.²⁷ Contoh yang masih aktual adalah kasus film *Innocence of Muslims* yang dibesut Nakoula Basseley Nakoula, pria keturunan Mesir-Amerika yang semula mengaku keturunan Yahudi. Unjuk rasa menentang film *Innocence of Muslims* terjadi di berbagai penjuru negara Islam karena film itu dianggap mendiskreditkan Nabi Muhammad.²⁸ Kemarahan umat Islam semakin tak terbendung karena menurut Reuters, sejumlah pejabat Amerika menyatakan bahwa polisi tak bakal menyelidiki proyek film itu, meski film anti Islam itu telah menimbulkan kekerasan di beberapa negara. Alasan mereka, memproduksi sebuah film bukanlah kejahatan di Amerika. Negeri Paman Sam itu memiliki undang-undang kebebasan berbicara dan berpendapat (*freedom of speech*).

Deradikalisasi Melalui Pendidikan Islam Inklusif-Multikultural

Menanggulangi terorisme dan radikalisme Islam bukanlah perkara yang mudah. Sebab, terorisme dan radikalisme Islam bukan semata-mata gerakan sosial

²⁵ A. Safril Mubah, *Teroris versus Globalisasi: Perlawanan Jaringan Jamaah Islamiyah terhadap Hegemoni Amerika* (Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2012), hlm. viii

²⁶ *Ibid.*, hlm. 4

²⁷ Mun'im A. Sirry, *Membendung Militansi Agama; Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern* (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 30

²⁸ Kemunculan film yang menggambarkan Nabi Muhammad sebagai penggoda perempuan ini telah memicu kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Di Libya, masyarakat menentang keras film Basseley ini. Mereka menembakkan peluncur granat ke gedung Kedutaan Amerika di Libya, dari lahan pertanian. Duta Besar Amerika Serikat untuk Libya, Chris Stevens, dan tiga anggota kedutaan tewas akibat serangan roket ke konsulat AS di kota Benghazi, pada Selasa malam, 11 September 2012.

belaka, namun juga merupakan ideologi. Ideologi tidak mungkin dapat dibasmi hanya dengan pendekatan militer/keamanan saja. Masih banyaknya aksi terorisme di bumi Indonesia merupakan bukti konkrit betapa penggunaan pendekatan militer/keamanan saja tidak cukup efektif untuk membasmi terorisme dan radikalisme Islam hingga akar-akarnya.²⁹

Oleh karena itu, berbagai pendekatan penanganan terorisme dan radikalisme Islam lainnya harus pula senantiasa diupayakan. Salah satunya adalah dengan program deradikalisasi melalui pendidikan Islam bernuansa inklusif-multikultural. Deradikalisasi adalah upaya sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa fanatisme sempit, fundamentalisme, dan radikalisme berpotensi membangkitkan terorisme.³⁰ Deradikalisasi dapat pula dipahami sebagai segala upaya untuk menetralisasi paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti agama, psikologi, hukum serta sosiologi, yang ditujukan bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal.³¹ Sebagai rangkaian program yang berkelanjutan, deradikalisasi ini meliputi banyak program yang terdiri dari reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat dengan tindak pidana terorisme (para terpidana tindak pidana terorisme).³²

Dalam konteks ini, pendidikan agama (Islam) sebagai media penyadaran umat dihadapkan pada problem bagaimana mengembangkan pola keberagamaan berbasis inklusivisme, pluralis dan multikultural, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan masyarakat tumbuh pemahaman keagamaan yang toleran, inklusif dan berwawasan multikultur. Hal ini penting sebab dengan tertanamnya kesadaran demikian, sampai batas tertentu akan menghasilkan corak paradigma beragama yang *hanif*. Ini semua mesti dikerjakan pada level bagaimana membawa pendidikan agama dalam paradigma yang toleran dan inklusif.³³

Filosofi pendidikan agama yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain, perlu dikritisi untuk selanjutnya dibenahi dan dilakukan reorientasi. Konsep iman-kafir, muslim non-muslim, dan *truth claim* yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat pada agama

²⁹ Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan...", hlm. 225

³⁰ Nasir Abbas, "Berdayakan Potensi Masyarakat dalam Pemberantasan Terorisme", *Komunika*, 12 (VII) Juli 2011: 5

³¹ Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkr.Sel", *Yudisial*, III (2) Agustus 2010: 110

³² Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), hlm. 63

³³ Edi Susanto, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)", *KARSA*, IX (1) April 2006: 785

lain, semestinya “dibongkar” agar umat tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan bukan jalan memperoleh keselamatan. Jika ini yang terjadi, tanpa ragu lagi dan pasti akan merusak harmonisasi agama dan menghilangkan sikap saling menghargai, sehingga pada gilirannya sangat rentan konflik.³⁴

Demikian pula, guru-guru agama di sekolah, sebagai ujung tombak pendidikan agama dari Taman Kanak-Kanak sampai dengan SLTA—bahkan perguruan tinggi—nyaris tidak tersentuh oleh gelombang pergumulan dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar umat beragama.³⁵ Padahal guru-guru inilah yang menjadi mediator pertama untuk menterjemahkan nilai-nilai toleransi, pluralisme dan multikultural pada siswa, yang pada tahapan selanjutnya ikut berperan aktif dalam mentransformasikan kesadaran toleran secara lebih intens.

Sejalan dengan tanggungjawab tersebut, Abdullah menggarisbawahi lima tugas utama pendidikan (agama) Islam, khususnya di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), dalam menghadapi keragaman agama, yaitu (1) mengenalkan isu-isu kontemporer yang dihadapi umat Islam, bersamaan dengan upaya menjelaskan ajaran Islam klasik, (2) mengarahkan tujuan utama Islam pada pemecahan permasalahan mengenai hubungan antar manusia, (3) mengkontekstualisasikan Islam, (4) mengkritisi penekanan pendidikan agama hanya pada domain kognitif, dan (5) mendedikasikan Islam tidak semata-mata untuk pengembangan moralitas individu, melainkan juga moralitas publik.³⁶

Salah satu sasaran tujuan dari tugas utama tersebut adalah pendidikan agama bisa membekali peserta didik kecakapan hidup (*life skill*) berupa kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi dalam sepanjang kehidupannya di tengah realitas masyarakat yang plural. Konsekuensinya, pendidikan agama perlu menekankan pada bagaimana mengajarkan tentang agama (*teaching about religion*) yang melibatkan pendekatan kesejarahan dan pendekatan perbandingan.³⁷ Hal ini bermanfaat untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik mengenai aspek universal dan partikular ajaran agamanya. Disamping itu, pendekatan tersebut bermanfaat juga untuk mengatasi kurangnya perhatian selama ini terhadap upaya mempelajari agama-agama lain dan kurangnya penanaman nilai-nilai moral yang mendukung kerukunan antar umat beragama lantaran sikap *overprotective* sehingga kecurigaan tetap mewarnai cara pandang antar penganut agama.³⁸

³⁴ *Ibid.*, hlm. 786

³⁵ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005), hlm. 131-132

³⁶ M. Amin Abdullah, *Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka* (Yogyakarta: Suka Press, 2010), hlm. 139-140

³⁷ Baidhaw, *Pendidikan Agama...*, hlm. 102

³⁸ Mahmud Arif, “Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural”, *Jurnal Pendidikan Islam* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I (1), Juni 2012: 12

Karena itu, dengan meminjam filsafat pendidikan yang dikembangkan Paulo Freire yang menegaskan bahwa pendidikan harus difungsikan untuk pembebasan (*liberation*) dan bukan penguasaan (*domination*) maka pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan domestikasi dan bukan penjinakan sosial budaya (*social and cultural domestication*). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia sehingga secara metodologis bertumpu pada prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip bertindak untuk mengubah realitas yang menindas sekaligus secara bersamaan dan terus menerus berusaha menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk mengubah kenyataan yang menindas tersebut.³⁹

Dengan perspektif ini, maka kini kita mesti melakukan pembebasan terhadap pendidikan agama yang selama ini dilakukan, dengan memberi warna yang lebih menekankan dimensi inklusivitas. Dalam kondisi demikian, yang perlu dilakukan adalah melakukan reorientasi visi pendidikan agama (Islam) yang berbasis eksklusif-monolitik ke arah penguatan visi inklusif-multikulturalis. Hal ini dilakukan karena telah terjadi kegagalan dalam mengembangkan semangat toleransi dan pluralitas dalam pendidikan agama, yang pada gilirannya telah menumbuhsuburkan gerakan radikalisme agama. Hal inilah yang mesti kita renungkan bersama agar pendidikan agama kita tidak menyumbangkan benih-benih konflik antar agama.⁴⁰

Karena itu, kebijakan pendidikan yang mengeliminasi arti signifikan keanekaragaman dan kemajemukan agama, perlu diantisipasi bersama, sehingga dalam merancang sistem pendidikan tidak hanya mengandalkan basis kognisi, tetapi juga bagaimana membentuk kesadaran beragama dalam tata pergaulan masyarakat yang damai dan sejahtera.⁴¹ Fakta lain membuktikan bahwa untuk mengembangkan gerakan deradikalisasi khususnya di kalangan perguruan tinggi memang sangat rumit. Tantangannya bukan hanya dari mahasiswa yang sudah menjadi eksponen gerakan Islam radikal, akan tetapi juga dosen-dosen di Perguruan Tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa ideologi radikalisme ini merupakan ideologi yang sangat kuat tertanam di dalam diri seseorang. Ketika seseorang sudah masuk di dalamnya, maka akan sangat sulit keluar. Yang mungkin adalah menjadi semakin kuat dan bertambah kuat.⁴²

Perguruan tinggi adalah lembaga strategis untuk mencetak kader-kader bangsa di masa depan. Posisi inilah yang disadari betul oleh mereka kaum radikal itu. Maka, rekrutmen yang besar-besaran dilakukan justru di kampus. Melalui rekrutmen terhadap anak-anak mahasiswa yang pintar, maka mereka

³⁹ Paulo Freire, *Deschooling Society*, (New Jersey: Penguin Books, 1986).

⁴⁰ Edi Susanto, "Pendidikan Agama"..., hlm. 787

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Nur Syam. "Deradikalisasi Melalui Pendidikan Tinggi." *LAIN Sunan Ampel*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2571> [26 April 2013]

akan memperoleh kader militan dan sekaligus juga calon pemimpin di masa yang akan datang. Melihat realitas empiris seperti ini, maka pantaslah jika gerakan deradikalisasi tersebut justru diarahkan ke Perguruan Tinggi. Harus disadari bahwa lembaga pendidikan tinggi merupakan institusi yang sangat strategis ke depan terkait dengan kepemimpinan bangsa. Maka menurut Nur Syam harus dibentengi secara memadai terhadap para mahasiswa agar tidak memasuki kawasan yang seperti itu.⁴³

Mencari Format Ideal Pendidikan Islam Inklusif-Multikultural

Sebagaimana diketahui bahwa praktik dan proses pendidikan terutama yang berlangsung di lembaga pendidikan mempunyai peran dalam membentuk watak dan perilaku setiap peserta didik. Karena itu, setiap proses pembelajaran, terlebih pendidikan agama (Islam) seharusnya mempertimbangkan perlunya meng-*insert civic values* dalam kegiatan pembelajaran sehingga mampu mencetak *output* yang mempunyai kesadaran multikultural dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai komponen yang terlibat dalam proses pendidikan perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga mendukung terwujudnya gagasan tersebut. Dalam hal ini, yang perlu mendapat perhatian adalah faktor kurikulum, pendidik, dan strategi pembelajaran yang digunakan pendidik. Ini bukan berarti bahwa faktor lain kurang penting, namun ketiga hal tersebut yang agaknya menempati prioritas.⁴⁴

Perumusan kurikulum pendidikan Islam yang bermuatan toleransi merupakan langkah mendesak yang harus dilakukan. Sebab, dewasa ini eskalasi kekerasan berbasis agama kian meningkat. Keberadaan kurikulum pendidikan Islam bermuatan nilai-nilai toleransi menjadi komponen yang penting lantaran menjadi pedoman bagi para pendidik dalam menyampaikan materi-materi tentang ajaran Islam yang menghargai keragaman dan perbedaan.⁴⁵

Bertolak dari perspektif tersebut, maka dari segi kurikulum, sejak dini peserta didik harus diajarkan dan dibiasakan tidak hanya dengan materi pelajaran yang bersifat normatif-doktrinal-deduktif yang tidak ada hubungannya dengan konteks budaya, namun juga materi yang bersifat historis-empiris-induktif.⁴⁶ Hal

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Muqowim, "Mencari Pola Pendidikan Agama Dalam Perspektif Multikultural", *MDC Jatim*, I (3) Tahun II, Oktober 2004: 8

⁴⁵ Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan...", hlm. 229

⁴⁶ Perlunya mempertimbangkan aspek budaya dalam membuat kurikulum ini ditegaskan oleh Peshkin. Lebih jauh lihat Alan Peshkin, "The Relationship Between Culture and Curriculum: A Many Fitting Thing", dalam Philip W. Jackson, ed., *Handbook of Research on Curriculum* (New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996), hlm. 248-267

ini mengindikasikan perlunya perimbangan antara materi yang berupa teks dan konteks. Bahwa teks berisi ajaran normatif yang masih bersifat umum, sementara konteks berupa realitas empirik-faktual yang bersifat partikular. Persoalan seringkali muncul justru ketika teks berhadapan dengan realitas partikular yang heterogen tersebut. Karena itu, materi pelajaran justru harus berisi realitas yang dihadapi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, meskipun materi yang diberikan memuat teks-teks normatif, namun ia juga harus berisikan kasus-kasus konkrit di masyarakat sehingga anak sadar bahwa ia hidup dalam situasi nyata yang penuh perbedaan.

Dalam rangka membangun keberagaman inklusif di sekolah ada beberapa materi pendidikan agama Islam yang bisa dikembangkan dengan nuansa multikultural, antara lain:

Pertama, materi al-Qur'an, dalam menentukan ayat-ayat pilihan, selain ayat-ayat tentang keimanan juga perlu ditambah dengan ayat-ayat yang dapat memberikan pemahaman dan penanaman sikap ketika berinteraksi dengan orang yang berlainan agama, sehingga sedini mungkin sudah tertanam sikap toleran, inklusif pada peserta didik, yaitu 1) Materi yang berhubungan dengan pengakuan al-Qur'an akan adanya pluralitas dan berlomba dalam kebaikan (Q.S. Al-Baqarah [2]: 148). 2) Materi yang berhubungan dengan pengakuan koeksistensi damai dalam hubungan antar umat beragama (Q.S. Al-Mumtahanah [60]: 8-9). 3) Materi yang berhubungan dengan keadilan dan persamaan (Q.S. An-Nisa' [4]: 135).

Kedua, materi fikih, bisa diperluas dengan kajian fikih siyasah (pemerintahan). Dari fikih siyasah inilah terkandung konsep-konsep kebangsaan yang telah dicontohkan pada zaman Nabi, sahabat ataupun khalifah-khalifah sesudahnya. Pada zaman Nabi misalnya, bagaimana Nabi Muhammad mengelola dan memimpin masyarakat Madinah yang multietnis, multikultur, dan multiagama. Keadaan masyarakat Madinah pada masa itu tidak jauh beda dengan masyarakat Indonesia, yang juga multietnis, multikultur, dan multiagama.

Ketiga, materi akhlak yang memfokuskan kajiannya pada perilaku baik-buruk terhadap Allah, Rasul, sesama manusia, diri sendiri, serta lingkungan, penting artinya bagi peletakan dasar-dasar kebangsaan. Sebab, kelanggengan suatu bangsa tergantung pada akhlak, bila suatu bangsa meremehkan akhlak, punahlah bangsa itu. Dalam al-Qur'an telah diceritakan tentang kehancuran kaum Luth, disebabkan runtuhnya sendi-sendi moral. Agar pendidikan agama bernuansa multikultural ini bisa efektif, peran guru agama Islam memang sangat menentukan. Selain selalu mengembangkan metode mengajar yang variatif, tidak monoton, dan yang lebih penting, guru agama Islam juga perlu memberi keteladanan.

Keempat, materi SKI, materi yang bersumber pada fakta dan realitas historis dapat dicontohkan praktik-praktik interaksi sosial yang diterapkan Nabi Muhammad ketika membangun masyarakat Madinah. Dari sisi historis proses pembangunan Madinah yang dilakukan Nabi Muhammad ditemukan fakta tentang pengakuan dan penghargaan atas nilai pluralisme dan toleransi.⁴⁷

Dalam konteks inilah, di sekolah misalnya, siswa diusahakan secara *gradual* untuk dibebaskan dari sekat-sekat primordial dengan menekankan pendidikan agama yang berbasis pada pluralitas dan kebersamaan, sehingga metode pembelajaran yang dikembangkan bukan lagi *indoktrinasi* melainkan suasana *dialogis*. Siswa diajak “berekreasi” terhadap realitas pluralitas sekaligus sekaligus menggali nilai humanitas serta ditradisikan membangun kebersamaan dengan sesama. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan agama Islam mesti digagas dengan *frame* inklusivisme, yakni—meminjam bahasa Amin Abdullah—memperteguh dimensi kontrak sosial keagamaan dalam pendidikan agama.⁴⁸ Pendidikan agama berbasis inklusivistik-multikultural mesti *hijrah* dari moralitas individual ke moralitas publik; berusaha memutasikan Tuhan dari konsep *utopis-metafisis* menuju *landing to the earth* dan berusaha melakukan lokalisasi akidah dan desentralisasi fikih.⁴⁹

Dengan demikian, penonjolan segi-segi persamaan dalam setiap agama, pengubahan orientasi pendidikan agama dari yang menekankan aspek *sektoral fiqhiyah* ke arah orientasi pengembangan aspek *universal-rabbaniyah*, penekanan atensi pada nilai-nilai kemanusiaan dengan tanpa memandang atribut-atribut sosio-religius serta ikhtiar menghindari sikap egoisme dalam beragama sehingga tidak terjadi klaim diri sebagai yang paling benar⁵⁰ merupakan karakteristik substantif pendidikan Islam berbasis inklusif-multikultural.

Setelah aspek kurikulum, sosok pendidik yang berparadigma inklusif-multikultural juga perlu ditekankan dalam proses pembelajaran agama di sekolah. Sebab, sebaik apa pun materi yang telah diprogramkan dalam kurikulum, jika tidak dipahami dan disampaikan oleh pendidik yang kompeten, maka tidak akan fungsional. Untuk itu, penyiapan tenaga kependidikan, dalam hal ini guru pendidikan agama, yang mempunyai paradigma pendidikan inklusif-multikultural harus dilakukan.

⁴⁷ Erlan Muliadi, “Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah”, *Jurnal Pendidikan Islam* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I (1) Juni 2012: 65

⁴⁸ M. Amin Abdullah, *Pendidikan Agama*, hlm. 138

⁴⁹ Edi Susanto, “Pendidikan Agama”, hlm. 788 Bahasan lebih elaboratif tentang ini periksa Muhammad Azhar, “Otonomi Keberagaman di Era Multikultural”, dalam Zakiyuddin Baidhawiy dan M. Thoyibi, ed., *Reinvensi Islam Multikultural* (Surakarta: Pusat Studi Bahasa dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 109-114

⁵⁰ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 151-152

Dalam perspektif Ahmad Asroni, ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menghasilkan pendidik yang inklusif-multikulturalis. *Pertama*, menyelenggarakan berbagai training, workshop, seminar, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berwawasan multikultural kepada para pendidik. *Kedua*, menyelenggarakan dialog keagamaan dengan pendidik agama, pemuka, atau umat beragama lainnya. Dengan demikian, para pendidik agama Islam dan pendidik agama lainnya dapat berbaur dan mengenal satu sama lain, sehingga pada gilirannya akan melahirkan sikap apresiatif dan toleransi terhadap agama lain. *Ketiga*, memperkenalkan bacaan-bacaan atau berbagai referensi yang bernuansa pendidikan multikultural sejak dini kepada para pendidik.⁵¹

Guru dan sekolah memegang peranan penting dalam mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman yang inklusif dan moderat di sekolah. Apabila guru mempunyai paradigma pemahaman keberagaman yang inklusif dan moderat, maka dia juga akan mampu mengajarkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman tersebut pada siswa di sekolah.⁵² Peran guru dalam hal ini meliputi; *pertama*, seorang guru/dosen harus mampu bersikap demokratis, baik dalam sikap maupun perkataannya tidak diskriminatif. *Kedua*, guru/dosen seharusnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada hubungannya dengan agama. Misalnya, ketika terjadi bom Bali (2003), maka seorang guru yang berwawasan multikultural harus mampu menjelaskan keprihatinannya terhadap peristiwa tersebut. *Ketiga*, guru/dosen seharusnya menjelaskan bahwa inti dari ajaran agama adalah menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, maka pemboman, invasi militer, dan segala bentuk kekerasan adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. *Keempat*, guru/dosen mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnis, dan agama (aliran), misalnya, kasus penyerbuan dan pengusiran Jamaah Ahmadiyah di Lombok-NTB dan kekerasan pada jamaah Syiah di Sampang Madura baru-baru ini tidak perlu terjadi, jika wacana inklusivisme beragama ditanamkan pada semua elemen masyarakat termasuk peserta didik.⁵³

Selain guru, sekolah juga memegang peranan penting dalam membangun lingkungan pendidikan yang pluralis dan toleran. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain; *pertama*, sekolah sebaiknya membuat dan menerapkan undang-undang lokal, yaitu undang-undang sekolah yang diterapkan secara khusus

⁵¹ Ahmad Asroni, "Membendung Radikalisme, Merajut Kerukunan Umat Beragama: Sebuah Upaya Rekonstruktif terhadap Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", *Penamas*, XXIV (1) 2011: 126

⁵² Husniyatus Salamah Zainiyati, "Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagaman Inklusif di Sekolah", *ISLAMICA*, I (2) Maret 2007: 141

⁵³ *Ibid.*, hlm. 141-142. Lihat juga Erlan Muliadi, "Urgensi Pembelajaran", hlm. 63

di satu sekolah tertentu. Dalam undang-undang sekolah tersebut, tentunya, salah satu poin penting yang tercantum adalah adanya larangan terhadap segala bentuk diskriminasi agama di sekolah tersebut; *kedua*, untuk membangun rasa saling pengertian sejak dini antara siswa-siswa yang mempunyai keyakinan berbeda, maka sekolah harus berperan aktif menggalakkan dialog antariman dengan bimbingan guru-guru dalam sekolah tersebut. Dialog antariman semacam ini merupakan salah satu upaya yang efektif agar siswa terbiasa melakukan dialog dengan penganut agama yang berbeda; *ketiga*, hal yang paling penting dalam penerapan pendidikan multikultural yaitu kurikulum dan buku-buku pelajaran yang dipakai, dan diterapkan di sekolah. Pada intinya, kurikulum pendidikan multikultural adalah kurikulum yang memuat nilai-nilai pluralisme dan toleransi keberagamaan. Begitu pula buku-buku, terutama buku-buku agama yang dipakai di sekolah, sebaiknya adalah buku-buku yang dapat membangun wacana peserta didik tentang pemahaman keberagamaan yang inklusif dan moderat.⁵⁴

Akhirnya, strategi pembelajaran yang digunakan guru mempunyai peran penting dalam membentuk sikap dan perilaku peserta didik dalam konteks inklusif-multikultural. Tanpa adanya metode dan media yang bagus, materi pembelajaran sebagus apapun akan sulit dicerna dengan baik oleh peserta didik. Pendidik dapat membuat metode dan media pembelajaran pendidikan agama Islam sesuai dengan kebutuhan serta kondisi objektif peserta didiknya. Dalam konteks ini, pendidik dituntut sekreatif mungkin untuk mendesain serta menggunakan metode dan media pembelajaran yang tepat, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai toleransi ke dalam kehidupan konkrit sehari-hari.⁵⁵

Pendidik agama Islam tidak boleh terpaku pada satu metode saja, namun harus dapat mengelaborasi berbagai metode seperti ceramah, diskusi, *field trip* atau studi banding, dan lain-lain. Peserta didik misalnya dapat diajak mengunjungi rumah ibadah dan berdialog dengan pengurus rumah ibadah atau jemaat. Pendidik (dan lembaga pendidikan) juga dapat mengagendakan untuk mengundang seorang atau kelompok minoritas agama untuk memberikan ceramah dan berdiskusi dengan peserta didik. Dengan begitu, peserta didik mendengar, berdiskusi, dan *sharing* pengalaman tentang apa saja yang mereka rasakan selama ini sebagai kaum minoritas. Pasca mendengar testimoni kaum minoritas, dalam diri peserta didik diharapkan tumbuh sikap apresiatif dan empatik terhadap kaum minoritas, sehingga mereka dapat menerima serta menempatkan kaum minoritas secara terhormat dan sederajat seperti halnya kelompok masyarakat yang lain.⁵⁶

⁵⁴ M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural...*, hlm. 61-63

⁵⁵ Ahmad Asroni, "Membendung Radikalisme...", hlm. 129

⁵⁶ Indriyani Ma'rifah, "Rekonstruksi Pendidikan...", hlm. 236

Sementara terkait media pembelajaran, pendidik agama Islam misalnya dapat memutar film dan membuat gambar, poster, komik, dan sebagainya yang memuat nilai-nilai toleransi beragama. Di era teknologi informasi yang berkembang sangat pesat belakangan ini, kiranya tidak sulit bagi pendidik agama Islam untuk mencari dan membuat media bermuatan nilai-nilai toleransi yang bagus dan menarik.

Film-film berkonten toleransi saat ini banyak beredar di masyarakat. Salah satunya adalah film “Mata Tertutup” karya Garin Nugroho yang diproduksi oleh Maarif Institute dan dirilis pada tahun 2011. Film ini dimaksud sebagai propaganda antikekerasan dan antifundamentalisme. Saat ini Maarif Institute tengah gencar melakukan *road show* dan diskusi film “Mata Tertutup” di sejumlah kota di Indonesia. Sasaran program ini ditujukan kepada siswa dan mahasiswa. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan Maarif Institute untuk mengadakan program *road show* dan diskusi “Mata Tertutup”. Dengan menonton film-film berkonten toleransi, peserta didik ke depannya diharapkan memiliki sikap toleransi dan menghargai kebhinnekaan.

Simpulan

Dalam pandangan penulis, deradikalisasi pendidikan Islam merupakan suatu keniscayaan. Upaya deradikalisasi pendidikan Islam dalam rangka membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk meminimalisir radikalisme Islam perlu menjadi kajian yang mendalam bagi para ahli dan praktisi pendidikan Islam di Indonesia. Jalan yang terbaik ke depan untuk mengusung deradikalisasi adalah dengan membangun deradikalisasi agama melalui lembaga pendidikan. Dan untuk itu sangat diperlukan gerakan *review* kurikulum di berbagai tingkatan pendidikan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan tindakan anti radikalisasi agama ini.

Dalam hal ini, yang paling penting dilakukan adalah melakukan reorientasi visi pendidikan agama (Islam) yang berbasis eksklusif-monolitik ke arah penguatan visi inklusif-multikulturalis. Inilah yang mesti kita renungkan bersama agar pendidikan agama kita tidak menyumbangkan benih-benih konflik antar agama dan aksi-aksi radikalisme atas nama agama dapat diminimalisir untuk masa depan Indonesia yang lebih kondusif tentunya.

Rujukan

- Abbas, Nasir, "Berdayakan Potensi Masyarakat dalam Pemberantasan Terorisme", *Komunika*, 12 (VII) Juli 2011
- Abdullah, M. Amin, *Membangun Perguruan Tinggi Islam Unggul dan Terkemuka*. Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Abdullah, M. Amin, *Pendidikan Agama Era Multikultural-Multireligius*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2005.
- Arif, Mahmud, "Pendidikan Agama Islam Inklusif-Multikultural", *Jurnal Pendidikan Islam* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I (1), Juni 2012
- A. Sirry, Mun'im, *Membendung Militansi Agama; Iman dan Politik dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Erlangga, 2003.
- Asroni, Ahmad, "Membendung Radikalisme, Merajut Kerukunan Umat Beragama: Sebuah Upaya Rekonstruktif terhadap Pengajaran Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum", *Penamas*, XXIV (1) 2011: 126-129
- Azhar, Muhammad, "Otonomi Keberagamaan di Era Multikultural", dalam Baidhaw, Zakiyuddin dan M. Thoyibi, ed., *Reinvensi Islam Multikultural*. Surakarta: Pusat Studi Bahasa dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.
- Azra, Azyumardi. "Rekrutmen Anak Sekolah." *UIN Jakarta*. Kamis, 28 April 2011. <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/28-artikel/1912--rekrutmen-anak-sekolah.html> [26 April 2013]
- Baidhaw, Zakiyuddin, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dimas. "Ansyaad Mbai: Dari Penjara, Mereka Bisa Kendalikan Aksi Teror." *Tempo.co*. Senin, 21 Maret 2011. <http://www.tempo.co/read/news/2011/03/21/078321584/Ansyaad-Mbai-Dari-Penjara-Mereka-Bisa-Kendalikan-Aksi-Teror> [28 April 2013]
- Fadjar, Abdullah dkk., *Laporan Penelitian Islam Kampus*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdiknas, 2007.

- Freire, Paulo, *Deschooling Society*. New Jersey: Penguin Books, 1986.
- Golose, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumpit*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Kartodirdjo, Sartono, *Ratu Adil*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Kosim, Mohammad, "Pesantren dan Wacana Radikalisme", *KARSA*, IX (1) April 2006.
- Ma'rifah, Indriyani, "Rekonstruksi Pendidikan Agama Islam: Sebuah Upaya Membangun Kesadaran Multikultural untuk Mereduksi Terorisme dan Radikalisme Islam," Conference Proceedings Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII IAIN Sunan Ampel Surabaya 5-8 November 2012.
- M. Nuh, Nuhrison, "Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Faham/Gerakan Islam Radikal di Indonesia", *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius*, VIII (31) Juli-September 2009.
- Mubah, A. Safril, *Teroris versus Globalisasi: Perlawanan Jaringan Jamaah Islamiyah terhadap Hegemoni Amerika*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis, 2012.
- Mubarok, Husni, "Memahami Kembali Arti Keragaman: Dimensi Eksistensial, Sosial dan Institusional", *HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius*, IX (35) Juli-September 2010.
- Mujani, Saiful, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Muliadi, Erlan, "Urgensi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, I (1) Juni 2012.
- Muqowim, "Mencari Pola Pendidikan Agama Dalam Perspektif Multikultural", *MDC Jatim*, I (3) Tahun II, Oktober 2004.
- Newsroom, Republika. "Perlu Deradikalisasi Pemahaman Islam di Ponpes." Jumat, 6 Februari 2009. <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/02/06/29871-perlu-deradikalisasi-pemahaman-islam-di-ponpes> [26 April 2013]

- Peshkin, Alan, "The Relationship Between Culture and Curriculum: A Many Fitting Thing", dalam Jackson, Philip W. ed., *Handbook of Research on Curriculum*. New York: Simon & Schuster Macmillan, 1996.
- Rokhmad, Abu, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal", *Walisongo*, 20 (1) Mei 2012.
- Rubaidi, A, Radikalisme Islam, *Nabdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Susanto, Edi, "Pendidikan Agama Berbasis Multikultural (Upaya Strategis Menghindari Radikalisme)", *KARSA*, IX (1) April 2006.
- Syam, Nur. "Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan." *IAIN Sunan Ampel*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2566> [26 April 2013]
- Syam, Nur. "Deradikalisasi Melalui Pendidikan Tinggi." *IAIN Sunan Ampel*. <http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=2571> [26 April 2013]
- Umar, Ahmad Rizky Mardhatillah, "Melacak Akar Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (2) November 2010: 171-172
- van Bruinessen, Martin, "Genealogies of Islamic radicalism in post-Suharto Indonesia", *South East Asia Research*, 10 (2) 2002.
- Wijaya, Endra, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan Nomor 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt. Sel", *Yudisial*, III (2) Agustus 2010.
- Yaqin, M. Ainul, *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Yunita, Niken Widya. "Sidik Jari Santri, Kalla Soroti Sikap Sensitif Tanpa Alasan." *detikNews*. Rabu, 7 Desember 2005. <http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/12/tgl/07/time/132014/idnews/493843/idkanal/10> [26 April 2013]
- Zainiyati, Husniyatus Salamah, "Pendidikan Multikultural: Upaya Membangun Keberagaman Inklusif di Sekolah", *ISLAMICA*, I (2) Maret 2007.